

Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DIY Dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran Pada Era Tatanan Baru di Kota Yogyakarta

Khoiri Najib¹, Herman Wahyu Dwi Maelana², Himawan Agung Nugroho³

^{1,2,3}) Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

¹ Email: khoirinajib@amayogyakarta.ac.id

² Email: herman@amayogyakarta.ac.id

³ Email: himawan@amayogyakarta.ac.id

Abstract

During COVID-19 pandemic, the unemployment rate increased because companies reduced the number of employees. The Labor and Transmigration Office of the DIY Province takes a role in reducing unemployment rate in Kota Yogyakarta. The purpose of this study is to explain the role of the Labor and Transmigration Office of DIY Province in an effort to reduce unemployment in the era of the new normal in the city of Yogyakarta. The research data was collected through observation, interviews, document studies and literature studies.

The role of the Labor and Transmigration Office of DIY Province, as a result of this research, is to create programs and activities for the community of Kota Yogyakarta so that the community has certified knowledge and abilities, namely the Workforce Certification Activity Program, Apprenticeship Program, Business Assistance Program for Educated Independent Workers (TKMT) and Technical Guidance for Accreditation and Instructor Accreditation of Job Training Institutes (LPK) and Job Training Centers (BLK).

Keywords: *Roles, Programs and Activities, Certification, Technical Guidance*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mencatat sebanyak 113.092 orang warga DIY yang terdaftar sebagai pencari kerja. Data ini merupakan data akhir tahun 2017. Mereka terdaftar sebagai pencari kerja di kantor pemerintah dan perusahaan swasta. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, jumlah ini lebih dari separuh jumlah warga Kota Yogyakarta sebanyak 417.744 pada tahun 2016. Sementara jumlah pengangguran sebanyak 64.019 orang pada tahun 2017 di Daerah

10.51277/keb.v17i2.122

P 1907-2376, E 2797-8699

∴ 109

Istimewa Yogyakarta menurut kualifikasi daerah, maka diperlukannya perhatian khusus dari pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Adanya pandemi Covid 19 jumlah pengangguran meningkat dikarenakan banyak perusahaan dan instansi yang melakukan pengurangan pekerja karena minimnya operasional di masa pandemik. Oleh karenanya, pemerintah, melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi DIY perlu terlibat untuk mengatasi masalah pengangguran ini.

Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan juga dalam Pasal 28 D ayat 2 mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Mengacu dari ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut, Pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berperan secara strategis untuk mengurangi angka pengangguran dan memberi peluang kerja kepada para pencari kerja atau pengangguran pada masa era tatanan baru saat ini, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran Pada Era Tatanan Baru di Kota Yogyakarta.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta dalam upaya mengurangi angka pengangguran pada era tatanan baru di Kota Yogyakarta?

B. KAJIAN LITERATUR DAN TEORI

1. Kajian Empiris

Subiyantoro dan Susatyo Herlambang (2021) melakukan sebuah penelitian mengenai pengaruh dampak psikologis, etos kerja, omset terhadap produktivitas usaha mikro dan menengah di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dampak-dampak psikologis, etos kerja dan omset memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap variabel produktivitas U.

Simbolong (2020) melakukan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif tentang Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D.I.Yogyakarta dalam menanggulangi pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan adalah bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY telah melaksanakan program-program yang sesuai dengan peraturan Gubernur pasal 5 huruf L tentang standarisasi kinerja, namun masih ada beberapa kendala dan keterbatasan terkait operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta.

Dewi dkk (2020) dalam penelitiannya, yang berjudul Dampak Pandemi Covid-19

terhadap tenaga kerja formal di Indonesia. ditemukan hasil bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada beberapa sektor, termasuk ketenagakerjaan dan akan semakin meningkat hingga tahun 2021 seiring dengan meningkatnya dampak dari pandemi. Sementara itu, Thereza dan Usman (2021), dalam penelitiannya mengenai analisis pengangguran usia di Pulau Jawa sebelum dan saat pandemi Covid-19, dengan menggunakan data sekunder serta analisis regresi logistik dengan unsur interaksi, mengemukakan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan kondisi ketenagakerjaan menjadi tidak stabil akibatnya tenaga kerja usia muda meningkat pesat. Dalam penelitian lainnya, disebutkan bahwa covid 19 memberikan pengaruh kepada melejitnya jumlah pengangguran yang disebabkan adanya pemberlakuan PSBB yang memberikan dampak pada perekonomian Indonesia.

2. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kependudukan atau status yang mengandung arti bahwa jika orang telah melakukan hal dan kewajibannya maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran/peranannya (Sukanto, 2002). Sementara itu, ahli lain berpendapat bahwa peran merupakan pola perilaku normative yang diharapkan pada status tertentu (Nurdin, 2006). Peran juga merupakan serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang status tertentu (Suwarno, 2015).

3. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Manulang (1990) menyebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melakukan pelayanan terhadap tenaga kerja dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai sebagai hasil kerjasama dengan lembaga-lembaga latihan yang ada..

4. Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja didefinisikan bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk dalam usia kerja, yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun, atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memperoleh barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Subri, 2003). Menurut definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

5. Pengangguran

a. Pengertian pengangguran

Menurut Kirbrandoko (1990), pengangguran merupakan pasar kerja yang berfungsi secara bebas, bahkan yang benar-benar bebas dari unsur monopoli dan

monopsony, tidak bisa diandalkan untuk melenyapkan pengangguran dengan menyamakan permintaan tenaga kerja yang sekarang dengan penawaran yang berlaku. Sukirmo (1996) mendefinisikan bahwa pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan diantara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Nanga (2005) menyebutkan bahwa pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan selera aktif tidak sedang mencari pekerjaan.

Berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkannya pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis antara lain:

- 1) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi akibat kesenjangan waktu, informasi, maupun kondisi geografis antara pencari kerja dan lowongan kerja.
- 2) Pengangguran struktural, adalah pengangguran yang terjadi karena penari kerja tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang ada.
- 3) Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim atau dengan kata lain, pengangguran musiman merupakan pengangguran yang berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian (Simanjuntak, 1998)

Berdasarkan ciri pengangguran, pengangguran digolongkan sebagai berikut:

- 1) Pengangguran terbuka (*open unemployment*)
Pengangguran terbuka dapat diartikan sebagai bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan.
- 2) Pengangguran tersembunyi
Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada beberapa faktor, antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang diperoleh.
- 3) Pengangguran musiman
Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, para penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau, para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah panen.

4) Setengah mengganggu

Di negara berkembang, migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu (Subri, 2014).

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penulisan kualitatif. Sudjana dan Ibrahim (2001) menjelaskan bahwa penulisan kualitatif memiliki maksud dan tujuan untuk memahami makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri. Penelitian ini memiliki subyek penelitian dan objek penelitian.

Menurut Azwar (1998) subyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orangnya, benda ataupun lembaga (organisasi), subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subyek penelitian inilah terdapat objek penelitian. Subyek penulisan penelitian ini adalah Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Standarisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Menurut Ratna (2010), obyek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Obyek penelitian pada penelitian ini yaitu peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Pengamatan
2. Wawancara
3. Dokumentasi, dan
4. Studi Pustaka

Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif menguraikan apa yang ada dari permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode *Miles and Huberman* (Emzir, 2010) yang menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu

1. Reduksi Data
2. *Display* Data
3. Penarikan Kesimpulan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No 62 tahun 2018, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY merupakan salah satu instansi yang diberikan tugas dan tanggungjawab melakukan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja

Kegiatan sertifikasi tenaga kerja bertujuan untuk merealisasikan upaya peningkatan pembelajaran dan kinerja dari calon pencari kerja. Istilah sertifikasi sendiri dapat diartikan sebagai keterangan, sertifikat, *brevet* dan pengesahan. Sertifikasi adalah standarisasi bagi para calon tenaga kerja di bidangnya masing-masing dan kemudian dibina oleh Dinasketrans DIY. Sertifikasi yang dilakukan oleh Dinasketrans DIY sudah memenuhi persyaratan kualitas yang sudah ditetapkan. Sertifikasi juga digunakan untuk menunjukkan kompetensi atau kualifikasi calon tenaga kerja berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Manfaat Program sertifikasi tenaga kerja untuk calon tenaga kerja sendiri adalah:

- a. Memudahkan calon tenaga kerja mendapatkan pekerjaan dengan kompetensi yang telah diakui;
- b. Dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan kemampuan yang dimilikinya;
- c. Bertambahnya nilai jual dalam rekrutmen tenaga kerja di waktu yang akan datang;
- d. Menambahnya produktivitas kerja;
- e. Mempunyai ukuran yang jelas akan adanya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki;
- f. Kesempatan berkarir lebih besar.

Adapun Program sertifikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY khususnya Bidang P2SP (Pembinaan, Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan) di Seksi P2S (Pembinaan Pelatihan dan Standarisasi) terdiri dari tujuh bidang sebagaimana table berikut ini.

Tabel 1.
Bidang Sertifikasi Tenaga kerja dan Jumlah Peserta

No	Nama Bidang	Jumlah Peserta
1.	Bidang Pariwisata	58
2.	Bidang <i>Germent</i>	79
4.	Bidang Spa	88
5.	Bidang Komputer	51
6.	Bidang Otomotif	60
7.	Bidang Batik	25

Sumber: Dinasketrans DIY

Dari 7 (tujuh) bidang sertifikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi diikuti oleh beberapa Balai Latihan Kerja (BLK) dan Sekolah. Kegiatan pelatihan dilakukan secara daring untuk teori dan tatap muka untuk praktikum dengan dibagi dalam beberapa kelompok kelas.

2. Program Pemagangan

Dalam rangka untuk meningkatkan minat masyarakat umum dan khususnya untuk pencari kerja, yaitu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menyelenggarakan program pemagangan ke Jepang. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa program pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerjasama secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi/jasa di perusahaan, dalam rangka mengesuai keterampilan atau keahlian tertentu.

Program pemagangan yang diselenggarakan didukung oleh forum komunikasi jejaring pemagangan yang merupakan unit organisasi non struktural yang independen, yang berkedudukan di pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mewakili lembaga (*exofficio*), yang berfungsi untuk memfasilitasi, menghimpun dan memberikan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan program pemagangan. Forum komunikasi jejaring pemagangan perlu memiliki tata kerja organisasi (statuta) yang meliputi wewenang, tugas dan fungsi serta tanggungjawab. Mengacu pada tata kerja organisasi tersebut, forum dalam melakukan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk penetapan kebijakan dalam program pemagangan di luar negeri.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menyelenggarakan program pemagangan ke Jepang melalui kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja RI dengan *Internasional Manpower Development Organization Japan* (IM Japan). Manfaat pemagangan untuk calon tenaga kerja adalah:

- a. Bagi Pemerintah
 - 1) Menambah kemampuan dan kompetensi (*skill, knowledge, attitude*) tenaga kerja;
 - 2) Mengurangi pengangguran;
- b. Bagi Perusahaan
 - 1) Mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan
- c. Bagi Peserta
 - 1) Meningkatkan kompetensi kerja
 - 2) Mendapatkan pengalaman kerja riil
 - 3) Menjadi media mendapatkan pekerjaan

Untuk pendaftaran seleksi magang ke Jepang, terbagi menjadi 2 bagian. Untuk pendaftar laki-laki dapat dilakukan melalui website www.nakertrans.jogjaprov.go.id dan dilanjutkan verifikasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, sedangkan untuk pendaftaran seleksi magang Jepang untuk perempuan dilakukan di Kantor Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Dengan adanya program magang Jepang, peserta dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan teknik di perusahaan kecil dan menengah di Jepang, dan untuk selanjutnya ketika setelah kembali ke Indonesia, peserta diharapkan dapat membantu membangun industri di Indonesia, serta mengembangkan ilmu yang didapat selama mengikuti magang Jepang. Tetapi program ini untuk masa pandemi tidak dapat dilaksanakan karena ada pembatasan akses di seluruh dunia sehingga pada masa Covid-19 ini untuk program magang Jepang dihentikan sementara untuk beberapa waktu, sampai waktu sudah kondusif untuk melaksanakan kembali. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY berharap adanya program magang Jepang dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Yogyakarta

3. Program Bantuan Usaha Kepada Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melaksanakan program dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu yaitu Program Bantuan Usaha Kepada Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dengan melakukan Kegiatan Pembentukan Kesempatan Kerja. Tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah:

- a. Menciptakan kesempatan kerja/usaha baru khususnya bagi peserta kegiatan dan masyarakat sekitar pada umumnya;
- b. Meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah Yogyakarta;
- c. Menumbuhkan kerjasama antar unit-unit usaha produktif untuk mengoptimalkan potensi sumber daya di Kota Yogyakarta

Adapun sasaran dilaksanakannya Kegiatan kesempatan Kerja adalah:

- a. Tenaga kerja terdidik yang merupakan masyarakat DIY yang berpendidikan minimal SLTA sampai dengan D3, berusia 18-40 tahun
- b. Disiplin
- c. Memiliki kemampuan dan semangat untuk berwirausaha serta mampu bekerja secara individu dan kelompok

Jenis kegiatan yang dilakukan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2
Jenis Kegiatan TKMT

No	Jenis Kegiatan
1.	Pengolahan Makanan
2.	Pengolahan Kayu
3.	Pengolahan Bumbu
4.	Pengolahan Fashion

Sumber: Dinasketrans DIY

Peserta dapat membentuk wirausaha baru dari Tenaga Kerja Mandiri Terdidik sebagai upaya penciptaan lapangan kerja/usaha dan pengurangan pengangguran di Kota Yogyakarta melalui pelaksanaan kegiatan TKMT ini.

4. Bimbingan Teknis Akreditasi dan Akreditasi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Dan Balai Latihan Kerja (BLK)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY setiap tahunnya diselenggarakan bimbingan teknik (bimtek) untuk LPK dan BLK yang ada di Kota Yogyakarta. Bimbingan teknik adalah pelatihan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para peserta dan kualitas SDM-nya, dan pesertanya akan memperoleh materi sesuai dengan bidang yang dipilihnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melakukan dua jenis kegiatan Bimtek yaitu Bimtek Akreditasi LPK/BLK dan Bimtek Akreditasi Instruktur LPK/BLK.

Tujuan diadakannya Bimtek Akreditasi dan Akreditasi Instruktur untuk instansi pelatihan di Kota Yogyakarta adalah:

- a. Meningkatkan kelayakan lembaga pelatihan dan program yang dilaksanakan
- b. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan instansi
- c. Memberikan rekomendasi penjaminan mutu kepada instansi yang diakreditasi
- d. Mendorong perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi;

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY memiliki peran dalam upaya mengurangi angka pengangguran di era tatanan baru dengan menyelenggarakan program-program yaitu:

- a. Program Sertifikasi Tenaga Kerja
Program sertifikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, khususnya Bidang Pembinaan, Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan (P2SP), di Seksi P2S (Pembinaan Pelatihan dan Standarisasi) terdiri dari tujuh bidang yaitu: Bidang Pariwisata dengan peserta 58 orang, bidang *garment* dengan peserta 79 orang, bidang spa dengan peserta 88 orang, bidang komputer dengan peserta 51 orang, bidang otomotif dengan peserta 60 orang, bidang batik dengan peserta 16 orang, dan bidang *welding* dengan peserta berjumlah 55 orang dari berbagai instansi/lembaga. Tujuan diselenggarakannya program Sertifikasi adalah mempermudah para calon tenaga kerja/pengangguran mendapatkan pekerjaan karena telah memiliki sertifikat yang telah diakui.
- b. Program Pemagangan
Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat umum dan khususnya untuk pencari kerja (pengangguran), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

menyelenggarakan program pemagangan ke Jepang. Setiap peserta yang mendaftar magang ke Jepang harus memenuhi beberapa persyaratan (persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan administrasi) sesuai permintaan perusahaan tempat diadakan magang. Pemagangan untuk laki-laki memiliki 40 jenis pekerjaan dan untuk magang perempuan hanya satu jenis pekerjaan yaitu bidang *assistant caregiver*.

Peserta yang sudah melakukan pendaftaran akan melalui beberapa tahap seleksi antara lain pemeriksaan administrasi awal, kesamaptaan tubuh (cek fisik), tes ketahanan fisik, wawancara, tes kesehatan (*medical check up*), tes bahasa Jepang, pembuatan paspor, dan pelatihan pra pemberangkatan.

- c. Program Bantuan Usaha Kepada Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melaksanakan Kegiatan Pembentukan Kesempatan Kerja dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mengurangi angka pengangguran di DIY. Jenis usaha dalam kegiatan tersebut antara lain pengolahan makanan, pengolahan kayu, pengolahan bumbu, pengolahan fashion.
- d. Program Bimtek Akreditasi dan Akreditasi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Dan Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY setiap tahunnya melakukan bimtek (Bimbingan teknik) untuk LPK dan BLK yang terdapat di Kota Yogyakarta. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terdiri dari dua jenis kegiatan bimbingan teknis, yaitu Bimtek Akreditasi dan Bimtek Instruktur. Untuk jumlah peserta yang mengikuti bimtek akreditasi sebanyak 19 peserta dari berbagai instansi/lembaga pelatihan di Kota Yogyakarta, untuk bimtek instruktur sebanyak 20 peserta dari berbagai instansi/ lembaga pelatihan di Kota Yogyakarta.

2. SARAN

Saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sebaiknya melibatkan elemen masyarakat dan pengusaha lokal serta melakukan kerjasama keduanya untuk menyediakan kesempatan kerja, misalnya pemagangan, sehingga masalah pengangguran akan lebih diatasi.
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sebaiknya melakukan penyebaran informasi lapangan kerja ke masyarakat melalui jejaring media social (media online) dan media masa suoaya masyarakat dapat mengetahui infromasi pasar kerja dan
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempertemukan pengguna tenaga kerja dengan pencari kerja sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Alama, Buchari dan Doni Juni Priansa, 2009, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Alfabeta, Bandung
- Dewi.M.M.dkk (2020), *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia*, *Jurnal POPULASI*, 28(2), 32
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo, Jakarta
- Fahmi, Irham, 2011, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung
- Hasibuan, Melayu S.P, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- _____, 2005, *Organisai dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktifitas*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hadi, Sutrisno, 2007, *Pengertian Wawancara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kirbrandoko, 1990, *Teknik dan Manajemen Penjualan*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1990, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Manulang, Sendjun H, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung
- Nazir, Muhammad, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nanga, Muana, 2005, *Makro Ekonomi: Teori Masalah dan kebijakan*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2005, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ratna, Nyoman Kutha, 2010, *Teori, Metode Dan Teknik Penelitian Sastra*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sastrohadiwiryono, B. Siswanto, 2005, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta
- Subiyantoro. A, Herlambang. S, (2021), *Pengaruh Pandemi Covid-19 Secara Psikologis, Etos Kerja, Omset Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman Yogyakarta*, *Jurnal SOLUSI*, 16(1), 101
- Simbolong.D.S, (2020), *Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY dalam Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Sudjana, Nana Dan Ibrahim, 2001, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung

- Setiawan, Bayu, 2016, Laporan Tugas Akhir, Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, Yogyakarta
- Sedarmayanti, 2009, Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran: Suatu Pengantar, Mandar Maju, Bandung
- Sekaran, Uma, 2006, Metodologi Penelitian, Selemba Empat, Jakarta
- Suwanto, dan Doni Juni Priansa, 2013, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
- _____, 2008, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Alfabeta, Bandung
- Subri, Mulyadi, 2003, Ekonomi Sumber Daya manusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2014, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perpektif Pembangunan, Rajawali Pers, Jakarta
- Simanjuntak, Payaman J, 1998, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Thereza, M., Usman, H., 2021, Analisis Pengangguran Usia di Pulau Jawa Sebelum dan saat Pandemi Covid-19, Jurnal Studi Pemuda, 10 (2), 99
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 ayat 2
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003